

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah

Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa perubahan manajemen dalam kegiatan penyelenggaraan negara dari corak sentralistis ke arah manajemen yang bercorak desentralistis, demokratis dan otonom.

Perubahan yang ada menjadikan tantangan ke depan yang semakin berat bukan hanya karena perkembangan lingkungan strategis, domestik dan internasional tetapi juga batasan-batasan terhadap kiprah perencanaan. Hal ini tentunya harus dihadapi dan dijawab dengan perencanaan pembangunan yang lebih baik yang bertujuan:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk memenuhi hal tersebut, peningkatan kinerja suatu organisasi pemerintah khususnya yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan daerah secara menyeluruh, harus mampu mengintegrasikan dan mensinergikan kegiatan-kegiatan pembangunan pada suatu

daerah agar berjalan secara baik dan optimal sehingga pencapaian tujuan pembangunan yang telah digariskan dapat dipenuhi secara baik.

A. GAMBARAN UMUM

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk seiring dengan berdirinya Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008. Dasar pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Undang Undang Nomor 33 Tahun 2008 pada tanggal 26 September 2008, dengan posisi koordinat : 2° 10' 0" - 3° 40' 0" LU dan 105° 15' 0" - 106° 45' 0" BT. Langkah awal yang dilakukan adalah mempersiapkan Infrastruktur sarana dan prasarana umum di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini penting dilakukan untuk dapat menentukan fokus dan kebijakan pembangunan fisik infrastruktur umum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

1. Kondisi Sarana dan Prasarana pekerjaan Umum

Pengembangan dan pembangunan fisik infrastruktur di kabupaten Kepulauan Anambas diarahkan untuk dapat mendukung kemudahan sarana dan prasarana fisik mobilitas masyarakat satu tempat ke tempat lain, Percepatan pembangunan untuk menunjang bangkitan ekonomi masyarakat, pengelolaan dan distribusi air bersih/limbah. Sampai saat ini khususnya di kabupaten kepulauan Anambas fisik jalan dan jembatan belum terhubung secara keseluruhan antar kecamatan dan desa, hal ini disebabkan kondisi topografi alam yang sulit untuk di jangkau khususnya bukaan jalan baru secara struktur geologisnya cukup sulit. Pekerjaan Umum itu dibagi menjadi menjadi 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Bina marga, Bidang Cipta karya, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Jasa Konstruksi.

a. Bidang Bina Marga

Bina marga merupakan salah satu bidang yang fokus pada perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan fisik jalan dan jembatan, geometrikal bukaan jalan baru sampai perkerasan yang bertujuan untuk mempercepat akses antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga percepatan bangkitan ekonomi masyarakat sesuai dengan target dan rencana pemerintah.

b. Bidang Cipta Karya

Melihat keadaan geografis sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari kurang lebih 255 pulau besar dan kecil maka sarana bangunan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dibangun dengan sistem undesentralisasi untuk memudahkan masyarakat

mendapatkan pelayanan publik langsung tanpa harus ke pusat ibukota Kabupaten, yaitu dari desa ke Ibukota kecamatan, dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten.

Cipta Karya merupakan salah satu bidang yang fokus pada perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan fisik Bangunan, seperti bangunan kantor, gedung pertemuan, balai desa, Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), gedung pelayanan publik lainnya, serta tata ruang kawasan.

c. Bidang Sumber Daya Air

Sumber Daya Air merupakan salah satu bidang yang fokus pada perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan fisik Drainase dan Bangunan Air, Pengaturan Teknis Sumber Daya Air, Pembangunan dan Pengolahan Sumber Daya Air, Pengelolaan dan Konservasi Sungai.

d. Bidang Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi merupakan salah satu bidang yang mengatur pada perencanaan, pelaporan dan pengarsipan jasa konstruksi seperti Jasa laboratorium dan peralatan teknis pekerjaan umum lainnya.

2. Permasalahan dan Kendala Yang Dihadapi

Permasalahan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

a. Minimnya infrastruktur pekerjaan umum;

1. Belum tersedianya pusat perkantoran pemerintah kabupaten kepulauan Anambas;
2. Sarana gedung perkantoran aparatur desa yang belum memadai;
3. Minimnya ketersediaan jalan dan jembatan yang yang berkualitas baik.
4. Minimnya infrastruktur penampungan air baku;

b. Minimnya infrastruktur permukiman;

1. Tidak tertatanya pusat-pusat permukiman;
2. Minimnya fasilitas air bersih/air minum permukiman;
3. Minimnya sarana dan prasarana sanitasi;
4. Minimnya sarana dan prasarana persampahan;

c. Kondisi wilayah dan kapasitas sumber daya manusia;

1. Biaya pembangunan Infrastruktur yang tinggi;
2. Terbatasnya teknologi dalam pengolahan material dasar pembangunan infrastruktur;
3. Distribusi permukiman yang tidak merata;
4. Rendahnya kapasitas pengelolaan sumber daya air;

5. Belum optimalnya kapasitas aparatur baik dari sisi kualitas dan kuantitas;
6. Rendahnya kapasitas penyedia jasa kontruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur;
7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan infrastruktur.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 tahun 2011, Tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan penyusunan program, dan urusan keuangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang cipta karya dan bidang jasa konstruksi;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsure terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1) Seksi Pengaturan Teknis Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Drainase dan Bangunan Air;
 - 3) Seksi Pembangunan dan Pengolahan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengaturan Teknis Bina Marga;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pengawasan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengaturan Teknis Cipta Karya;
 - 2) Seksi Tata Ruang;
 - 3) Seksi Persampahan.
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
 - 1) Seksi Jasa Konstruksi;
 - 2) Seksi Alat Uji dan Peralatan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

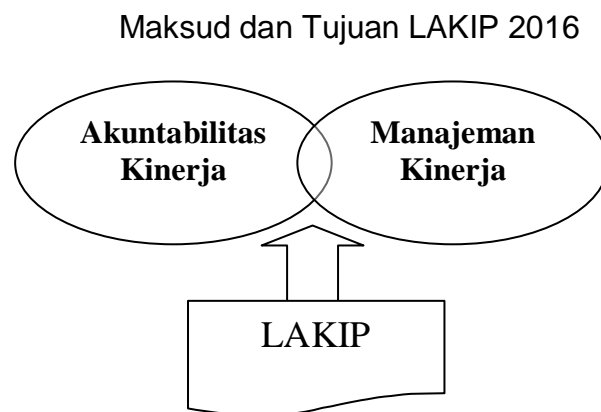
Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh

yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2016.
- 2. Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2016 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.



E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia dapat dilihat pada indikator *input*, *output* dan *outcome*.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab 1 – Pendahuluan**, meliputi gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Anambas serta maksud dan tujuan penyusunan LAKIP.
- Bab 2 – Rencana Kerja Tahun 2016**, menguraikan program-program pembangunan, kegiatan dan strategi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan.
- Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan pengukuran kerja, evaluasi dan analisis kinerja, serta analisis akuntabilitas keuangan.

Bab 4 – Penutup, menguraikan tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai tentang pelaksanaan dan kendala termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun mendatang.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (*strategic plan*) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada, sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas diawali dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni

”Menjadikan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi Masyarakat yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu yang Dilandasi Iman dan Taqwa”.

Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di atas dijadikan acuan untuk menetapkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasi melalui analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Selain itu juga diperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan membangun prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah melibatkan pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, yang menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kepulauan Anambas beserta seluruh perangkat organisasinya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan dan diarahkan untuk menunjang terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan ketentuan tersebut visi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu berperan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan sebagai berikut:

***” Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Permukiman yang Handal Berbasis
Kepulauan Sebagai Beranda Depan Nasional ”***

Penjelasan Makna Visi

Rumusan visi tersebut mengandung tiga kata-kata kunci yaitu “ Infrstruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Handal ”, “ Basis Kepulauan ”, dan “ Beranda Depan Nasional ”. Pengetian dari tiga kata-kata kunci adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman diartikan sebagai arah tujuan pembangun dinas PU yang akan targetkan pencapaiannya di tahun 2016. Sebagai bentuk perwujudan tingkat ketersediaan dan pelayanan dinas pekerjaan umum Daerah Kepulauan Anambas. Adapun bentuk pelayanan yang dimaksud adalah:
 - a. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;

- b. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
 - c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
 - d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
 - e. Bangunan gedung perkantoran pemerintahan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
 - f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang handal tersebut berbasis penataan ruang; dan
 - g. Jasa konstruksi daerah yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.
2. Basis kepulauan diartikan sebagai arah pengembangan sistem pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis kepulauan yang meliputi:
- a. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air baku memperhatikan ketersediaan daratan, konservasi daerah resapan serta jaringan distribusinya berskala kawasan yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya yang ada seperti (perikanan, pariwisata dan perhubungan);
 - b. Sistem jaringan jalan yang efisien lahan dan mengimplementasikan konsep *waterfront city*;
 - c. Jembatan yang menghubungkan pulau-pulau;
 - d. Pengelolaan persampahan baik padat maupun cair yang sesuai dengan karakter pulau kecil.
3. Beranda depan nasional diartikan sebagai:
- a. Letak geografis kabupaten kepulauan anambas sebagai daerah perbatasan negara. Daerah perbatasan merupakan beranda depan negara. Sebagai beranda depan negara, maka kabupaten kepulauan anambas merepresentasikan bangsa indonesia, oleh karena itu pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman haruslah berkualitas.

2. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan misi sesuai dengan mandat yang diterima. Diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi ini, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang ingin dicapai diwaktu yang akan datang. Pernyataan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan dan menata permukiman dan wilayah berbasis kepulauan;**
- 2. Membangun infrastruktur pemerintahan yang berkualitas;**
- 3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis kepulauan secara terpadu;**
- 4. Menjamin ketersediaan air baku yang seimbang dan berkelanjutan;**
- 5. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi.**

3. Tujuan

Untuk memberikan arah pencapaian yang jelas pada setiap misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2010-2015, maka dirumuskan tujuan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan menata permukiman dan wilayah berbasis kepulauan
- b. Membangun infrastruktur pemerintahan yang berkualitas
- c. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis kepulauan secara terpadu
- d. Menjamin ketersediaan air baku yang seimbang dan berkelanjutan
- e. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi.

4. Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategi organisasi dan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu. Penetapan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang diharapkan dapat memberikan arah pada pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Mengembangkan keterpaduan pengembangan wilayah dan pengembangan permukiman

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
Terpadunya pengembangan permukiman dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan wilayah	1. Tersusunnya rencana pengembangan wilayah dan pengembangan permukiman
	2. jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun di pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan
Berjalannya mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendukung implementasi rencana detail tata ruang wilayah	1. Terlayannya pengurusan IMB yang sesuai dengan rencana detail tata ruang di kabupaten
	2. persentase permukiman yang terbangun sesuai rencana tata ruang
Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan pemukiman yang tertata	1. jumlah kawasan yang terbangun jalan permukiman dengan layak sebagai dasar pengembangan kawasan
Meningkatnya pembangunan infrastruktur jaringan distribusi air bersih/air minum	1. jumlah kawasan yang tersusun rencana induk jaringan air bersih/air minum
	2. persentase masyarakat yang terlayani terhadap akses air bersih/air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum
Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah rumah tangga	1. Jumlah rumah tangga memiliki pengolahan limbah rumah tangga/septic tank
	2. Jumlah masyarakat yang terlayani MCK plus-plus dan septictank komunal
	3. Jumlah septic tank yang terlayani
Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	1. persentase masyarakat yang disediakan fasilitas pembuangan sampah permukiman
	2. persentase masyarakat yang memiliki prasarana tempat

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
	pengumpulan sampah sementara
	3. persentase masyarakat yang dilayani prasarana pengangkutan sampah
	4. persentase sampah yang diolah secara terpadu
Meningkatnya pembangunan infrastruktur pengaman pantai	1. Jumlah wilayah rawan gelombang yang terbangun infrastruktur pengaman pantai
Meningkatnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir	1. jumlah wilayah rawan banjir yang terbangun infrastrukturnya

Sasaran 2. Meningkatkan Pembangunan kantor pemerintahan kabupaten dan kantor Pemerintahan desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
1	meningkatnya pembangunan perkantoran pemerintahan kabupaten kepulauan anambas	1. persentase kebutuhan perkantoran pemerintah kabupaten kepulauan anambas yang dibangun
	meningkatnya pembangunan perkantoran pemerintahan desa	1. persentase kebutuhan perkantoran pemerintah desa yang terbangun

Sasaran 3. Meningkatkan keterpaduan jalan dan jembatan dengan infrastruktur lainnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya keterpaduan jalan dan jembatan dengan sistem jaringan prasarana lain dalam rangka menjamin efisiensi pelayanan	1. jumlah sarana dan prasarana publik dan pusat-pusat kegiatan/permukiman yang telah terhubung akses jalan dan jembatan 2. Adanya rencana induk penyediaan utilitas

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
	transportasi	
2	Meningkatnya panjang jalan yang berfungsi	1. jumlah panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 dengan aman
	Meningkatnya panjang jembatan yang berfungsi	1. jumlah panjang jembatan yang menghubungkan antar ruas jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 dengan aman

Sasaran 4. Menjaga catchment area lainnya dan Meningkatkan pembangunan Infrastruktur penampung air

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
1	Terpeliharanya daerah catchment area	1. Terpeliharanya daerah catchment area 2. Luas kawasan serapan air yang direhabilitasi
2	Meningkatnya pembangunan infrastruktur penampung air	1. Jumlah infrastruktur penampung air yang terbangun 2. Jumlah/debit air dialirkan (liter/detik)

Sasaran 5. Meningkatkan kualitas SDM jasa konstruksi dan Menumbuhkan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi	1. jumlah tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi yang tersertifikasi 2. jumlah IUJK yang diterbitkan 3. jumlah peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi yang tersosialisasikan 4. jumlah pelatihan tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi yang diberikan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	1. jumlah badan usaha jasa konstruksi yang dibina dan diawasi 2. persentase proyek yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
Terlaksananya proses lelang yang transparan dan berbasis kompetensi	1. jumlah proyek yang dilelangkan secara elektronik

5. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis kawasan perbatasan, dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan regulasi daerah di bidang ke-PU-an secara memadai. Regulasi tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ataupun bentuk-bentuk lainnya akan menjadi landasan hukum dan dasar operasional bagi Dinas PU untuk melaksanakan tupoksi dan muatan Renstra. Beberapa hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diantaranya adalah mekanisme insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian rencana tata ruang, konservasi kawasan resapan air (*catchment area*), dan proyek-proyek besar yang membutuhkan penganggaran tahun jamak (*multi years*) seperti pembangunan jembatan antar pulau.
2. Sebagaimana diketahui bersama, sektor pekerjaan umum adalah sektor yang membutuhkan anggaran yang besar karena melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik berikut pemeliharaannya. Ditambah lagi, kondisi kabupaten Kepulauan Anambas menyebabkan harga konstruksi lebih tinggi dibanding daerah-daerah lainnya. Untuk mengejar terwujudnya infrastruktur PU dan permukiman yang handal, maka perlu dipersiapkan sumber-sumber pembiayaan selain dari APBD kabupaten.

Melalui MP3EI, kabupaten Kepulauan Anambas telah mendapatkan komitmen pembiayaan yang bersumber dari APBN, demikian pula halnya dengan APBD Provinsi yang rutin didapat setiap tahunnya terkait status kabupaten sebagai kawasan strategis provinsi. Sektor yang belum banyak dioptimalkan adalah sektor swasta. Oleh karena itu, perlu digiatkan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) melalui berbagai skim yang saling menguntungkan.

3. Pengembangan infrastruktur adalah sektor yang tidak hanya padat modal saja, tetapi juga padat teknologi. Teknologi yang dibutuhkan tidak hanya pada tahap perancangan, pembangunan, dan *finishing* saja, melainkan juga pada tahap pengolahan material dasar. Penggunaan teknologi terkini akan lebih memhatikan kualitas dan keamanan hasil bangunan. Oleh karena itu dibutuhkan tidak hanya saja peningkatan kualitas sumber daya manusia saja, tetapi juga ketersediaan alat dan bahan untuk menunjang penerapan teknologi tersebut.
4. Pada intinya, pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada prakteknya, sebagaimana dapat diamati dari rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan Kecamatan, kebutuhan masyarakat didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur. Mekanisme Musrenbang sangat membantu SKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang hendak dijalankan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, rumusan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan program dan kegiatan.

Meskipun demikian, kegiatan turun langsung di desa untuk melihat kondisi sesungguhnya tetap perlu dilakukan. Melalui pemahaman sesungguhnya akan kondisi di lapangan akan dapat membuat perencanaan yang disusun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek saja, melainkan memiliki visi jangka panjang.

5. Pengembangan infrastruktur melibatkan tidak hanya Dinas Pekerjaan Umum semata, tetapi juga banyak SKPD lain. Pengembangan infrastruktur juga membutuhkan keterpaduan sehingga infrastruktur yang terbangun bisa sinergis dan konstruktif bagi pengembangan sektor-sektor lainnya. Contoh paling sederhana adalah pembangunan jalan. Terbangunnya jalan adalah bangkitan utama (*leverage*) untuk Bergeraknya bidang-bidang seperti perhubungan, usaha kecil menengah, dan layanan sosial dasar. Oleh karena itu keterpaduan lintas sektor mutlak diciptakan melalui koordinasi yang intens dan penyediaan rencana induk pengembangan infrastruktur.
6. Seringkali, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik terkendala oleh penyediaan lahan. Banyak aspek yang menjadi kendala dalam penyediaan lahan ini,

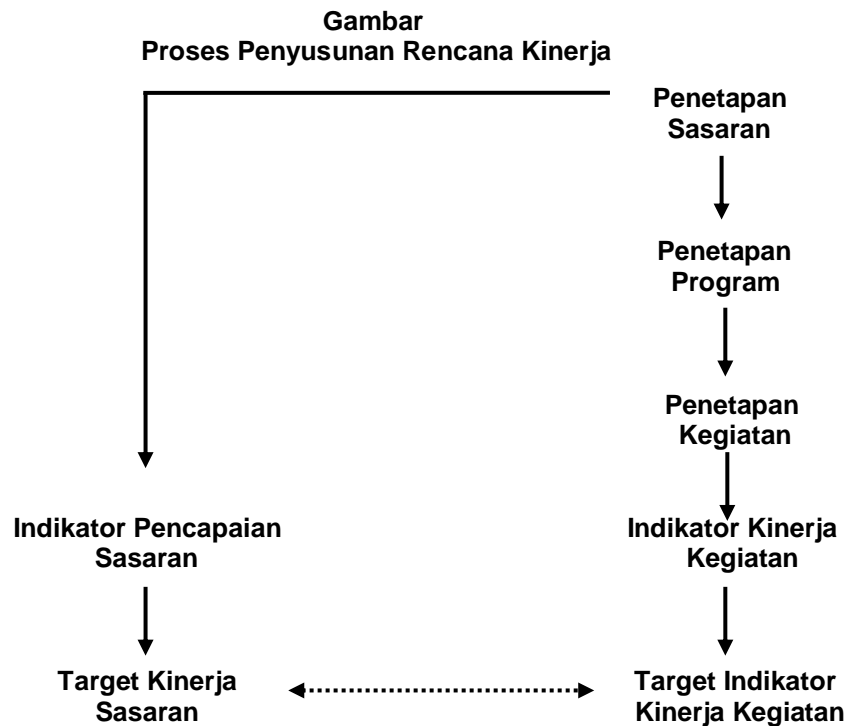
diantaranya adalah aspek kepemilikan lahan, permainan harga, hingga hak asasi manusia. Diperlukan mekanisme yang transparan dan berkeadilan sehingga kepentingan publik tetap terakomodasi tanpa mengorbankan hak-hak pribadi.

7. Karakteristik geografis kabupaten Kepulauan Anambas adalah pulau-pulau kecil dengan luasan masing-masing pulau kurang dari 2000 kilometer persegi. Karakteristik ini membedakannya dengan daerah-daerah lain. Pulau kecil memiliki kerentanan dibanding pulau besar khususnya dalam hal hidrologi (air tanah) dan abrasi. Sedikit saja terjadi perubahan penggunaan lahan menyebabkan pengaruh yang lebih besar di pulau kecil dibanding pada pulau besar. Oleh karena itulah dibutuhkan pengembangan infrastruktur yang berbasis kepulauan sehingga kerentanan ini dapat diantisipasi. Karakteristik infrastruktur berbasis kepulauan diantaranya adalah efisien lahan, mengkombinasikan antara daratan dan perairan yang mewujudkan antara lain dalam konsep *water front city*, dan tentunya harus lebih mengedepankan konservasi lahan.

B. Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kinerja ini akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja ini merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapainya dalam periode tahunan.

Proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan-tahapan berikut :



1. Proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan-tahapan berikut :

a. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang ingin dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Strategis yang telah ada.

b. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

d. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan target kerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

2. Program dan Kegiatan

Program yang telah dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 adalah sebanyak 14 program dan 28 kegiatan, dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 235.817.401.576,00.- dan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.536.954.394,00.- Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Telah bekerja sebagaimana tugas yang diberikan selama 12 bulan	Rupiah	1,734,800,000.00	1896310500	94.57
20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	Lancarnya aktifitas dalam bekerja di kantor	Rupiah	3,997,775,032.00	1088829522	68.57
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Telah bekerja sebagaimana tugas yang diberikan selama 12 bulan	RUPIAH	1,297,320,000.00	227100000	100

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
03	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan	Rupiah	80,710,000,000.00	16143390022	80,21

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
		Anambas				
45	Pembangunan Gedung Kantor (Dak)	Terbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	50,710,000,000.00	1433163000	54,12
46	Pembangunan Gedung Kantor (Multi Years)	Terbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	80,710,000,000.00	5717413140	65,09

(15). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
03	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan Di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	20.086.277.206,90	1279131700	86.78
10	Pembangunan Jembatan Dak)	Terbangunnya Jalan Di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	5608391100	3608391000	74.01
11	Pembangunan Jalan (DAK)	Terbangunnya Jalan Di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	83665660000	63605660000	64.60
09	Pebangunan jalan (Multi years)	Terhubungnya Jalan Antar Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	98022444122	94184407152	95.31

(16). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
----	----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
05	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Tersedianya dan Berfungsinya Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rupiah	953090.000	853296500	92,12%
03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak)	Tersedianya dan Berfungsinya Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rupiah	7.374.085.998	2526523500	85.06

(17). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
03.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Tersedia dan berfungsinya turap/Talud/Bronjong	Rupiah	70.525.000	588310500	84,32

(18). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
03.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Berfungsinya jalan dan jembatan sebagai sarana dan prasarana daerah	Rupiah	2.000.000.000.00	1977529400	32,12

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian

(25). Program Penyediaan dan Pengelolaan air Baku

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
06	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	Tersediannya Perencanaan Air Baku untuk Keperluan Masyarakat	Rupiah	300.000.000	294.492.100	95,10

(27). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
10	Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah (Dak)	Tersedianya sarana air limbah	Rupiah	-	-	0
06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Tersedianya system distribusi air minum yang baik	Rupiah	1.527.462.441,77	467.389.300	32,10
11	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Dak)	Tersedianya system distribusi air minum yang baik	Rupiah	6.800.400.415	3.748.4030.00	54,57
12	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Multi Years)	Tersedianya system distribusi air minum yang	Rupiah	24.878.846.396	12.468.554.889	48,22

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
		baik				

(29). Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
02	Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur	Terbangun dan Meningkatnya Infrastruktur dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Suatu Wilayah	Rupiah	2.816.517.059.84	2.757.083.871	97.89

(30). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
01	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Terbangunnya Infrastruktur Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan	Rupiah	1.900.163.968,58	1.366.371.200	71.91
02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Terbangunnya Jalan dan Jembatan Pedesaan	Rupiah	487.458.569,50	477.574.058	97.97
09.	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terfasilitasinya Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan (PPIP)	Rupiah	80.000.000	0	0

(31). Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyediaan Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tersedianya Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rupiah	5.005.910.000	566.100.000	11.31

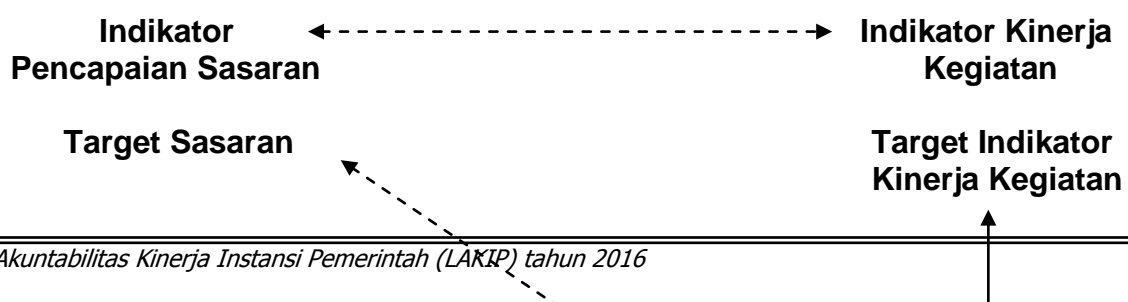
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran kinerja

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja mulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan visinya. Mekanisme pengukuran kinerja yang perlu diprioritaskan, yaitu:

Gambar
Mekanisme Pengukuran Kinerja





1. Penetapan Indikator Kerja

Indikator kerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Indikator kinerja *Input* yang digunakan bervariasi sesuai dengan masukan yang paling mempengaruhi terlaksananya kegiatan. Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari *Output* yang dihasilkan. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dari penetapan tujuan dan sasaran.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan system pengumpulan data kinerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.

B. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran yang menggunakan Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Indikator kinerja tersebut meliputi *Input*, *Output* dan *Outcome*. Sedangkan pengukuran kinerja dituangkan kedalam Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan selanjutnya kinerja dievaluasi dengan menggunakan formulir sebagaimana berikut: Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK), Pengukuran dan Pencapaian Sasaran (Formulir PPS).

Adapun capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Telah bekerja sebagaimana tugas yang diberikan selama 12 bulan	Tahun	95.00	85.78
20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	Lancarnya aktifitas dalam bekerja di kantor	Tahun	95.00	89.72

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar Rp 3.261.806.000.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 2 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.

Capaian kinerja untuk program tersebut yaitu 87.75% yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 2.388.214.550- atau 69.46% dari anggaran. Dapat dikatakan capaian kinerja untuk program tersebut adalah *cukup baik*.

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
03	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	100	98.40
45	Pembangunan Gedung Kantor (Dak)	Terbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	100	86.25
46	Pembangunan Gedung Kantor (Multi	Terbangunnya Gedung Kantor di Kabupaten Kepulauan	Rupiah	100	80.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
	Years)	Anambas			

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar Rp 30.995.537.184.85.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 3 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan kegiatan tersebut telah terlaksana.

Capaian kinerja untuk program tersebut yaitu 88.22, yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 13.067.234.550.- atau 41.98% dari anggaran. Jika dilihat dari capaian kinerja kegiatan tersebut baik. Kecilnya capaian realisasi keuangan pada kegiatan tersebut dikarenakan adanya penundaan pembayaran kegiatan multi years yang disebabkan keterbatasan anggaran untuk pembayaran pada tahun tersebut.

(15). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
03	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan Di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	100	100
10	Pembangunan Jalan (Dak)	Terbangunnya Jalan Di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	100	100
11	Pembangunan Jalan (Multi Years)	Terbangunnya Jalan Di Kabupaten Kepulauan	Rupiah	100	100

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
		Anambas			
09	Pembukaan dan Pengerasan Jalan	Terhubungnya Jalan Antar Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas	Rupiah	100	100

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah sebesar Rp 213.217.045.776.77.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 4 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan kegiatan tersebut telah terlaksana.

Capaian kinerja untuk program tersebut yaitu 100%, yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 91.288.507.313.- atau 78.13% dari anggaran. Jika dilihat dari capaian kinerja kegiatan tersebut sangat baik. Adanya penundaan pembayaran kegiatan multi years yang disebabkan keterbatasan anggaran untuk pembayaran pada tahun tersebut.

(16). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
05	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Tersedianya dan Berfungsinya Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rupiah	100	100

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak)	Tersedianya dan Berfungsinya Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rupiah	100	100

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong adalah sebesar Rp 7.569.985.998.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 2 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan kegiatan tersebut telah terlaksana.

Capaian kinerja untuk program tersebut yaitu 100%, yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 6.272.121.295.- atau 85.06% dari anggaran. Jika dilihat dari capaian kinerja kegiatan tersebut baik..

(17). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
03.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Tersedia dan berfungsinya turap/Talud/Bronjong	Rupiah	100	0

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong adalah sebesar Rp 221.525.000.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 1 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

(18). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
03.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Berfungsinya jalan dan jembatan sebagai sarana dan prasarana daerah	Rupiah	100	0

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah sebesar Rp 700.000.000.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 1 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

(25). Program Penyediaan dan Pengelolaan air Baku

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
06	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	Tersediannya Perencanaan Air Baku untuk Keperluan Masyarakat	Rupiah	100	0

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku adalah sebesar Rp 300.000.000.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 1 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran

(27). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
10	Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah (Dak)	Tersedianya sarana air limbah	Rupiah	100	100
06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Tersedianya system distribusi air minum yang baik	Rupiah	100	100
11	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Dak)	Tersedianya system distribusi air minum yang baik	Rupiah	100	100
12	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Multi Years)	Tersedianya system distribusi air minum yang baik	Rupiah	100	73.35

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah adalah sebesar Rp 34.110.228.602.77.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 4 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan kegiatan tersebut telah terlaksana.

Capaian kinerja untuk program tersebut yaitu 93.34%, yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 17.344.884.400.- atau 66.90% dari anggaran. Jika dilihat dari capaian kinerja kegiatan tersebut baik.. Rendahnya capaian realisasi anggaran disebabkan oleh adanya penundaan pembayaran pada kegiatan multi years .

(29). Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
02	Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur	Terbangun dan Meningkatnya Infrastruktur dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Suatu Wilayah	Rupiah	100	100

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh adalah sebesar Rp 2.816.517.059.84.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 1 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan kegiatan tersebut telah terlaksana.

Capaian kinerja untuk program tersebut yaitu 100%, yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 2.757.083.871.- atau 97.89% dari anggaran. Jika dilihat dari capaian kinerja kegiatan tersebut sangat baik..

(30). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
01	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Terbangunnya Infrastruktur Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan	Rupiah	100	100
02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Terbangunnya Jalan dan Jembatan Pedesaan	Rupiah	100	100
09.	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terfasilitasinya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)	Rupiah	100	0

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan adalah sebesar Rp 2.467.622.538.08.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 3 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan kegiatan tersebut telah terlaksana.

Capaian kinerja untuk program tersebut yaitu 100%, yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 1.843.945.258.- atau 84.94% dari anggaran. Jika dilihat dari capaian kinerja kegiatan tersebut sangat baik..

(31). Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)
1	Penyediaan Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tersedianya Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rupiah	100	40

Anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni adalah sebesar Rp 5.005.910.000.- Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan 1 kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 dan kegiatan tersebut telah terlaksana.

Capaian kinerja untuk program tersebut yaitu 40%, yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 566.100.000.- atau 11.31% dari anggaran. Jika dilihat dari capaian kinerja kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan waktu dan ketersediaan anggaran.

Dilihat secara keseluruhan tingkat capaian kinerja untuk seluruh program dan kegiatan yaitu sebesar 59.25%, yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 139.225.628.765,- atau 44.26% dari anggaran sebesar Rp 305.658.283.887.31,- dan realisasi fisik dari 23 kegiatan rata-rata sebesar 59.25%. Dapat dikatakan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 adalah kurang berhasil dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga berdampak pada hasil capaian kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

C. ASPEK PENUNJANG

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015, dukungan sumber daya manusia, dan aspek sarana dan prasarana.

1) Aspek Keuangan

Salah satu aspek penunjang yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum adalah aspek keuangan dalam bentuk pembiayaan kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Pelayanan Publik) yang dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas bersumber dari dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

Adapun Keseluruhan Dana/Anggaran yang digunakan untuk kinerja tahun 2015 (anggaran setelah perubahan) sebagaimana telah diuraikan dimuka adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 sebesar Rp 139.225.628.765,- atau 44.26% dari anggaran Rp. 305.658.283.887,31,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA
1	Belanja Pegawai	4.993.005.727	3.697.537.528	74.05	1.295.468.199
2	Belanja Langsung				
	1. Program Pelayanan Administrasi	3.261.806.000	2.388.214.550	69.46	873.591.450

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

Perkantoran					
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.995.537.184,85	13.067.234.550	41.98	17.928.302.634	
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	213.217.045.776,77	91.288.507.313	78.13	121.928.538.463,77	
4. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	7.569.985.998	6.272.121.295	85.06	1.297.864.703	
5. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	221.525.000	0	0	221.525.000	
6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	700.000.000	0	0	700.000.000	
7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku					
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	300.000.000	0	0	300.000.000	
9. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	34.110.228.602,77	17.344.884.400	66.90	16.765.344.202	
10. Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni	2.816.517.059,84	2.757.083.871	97.89	59.433.188	
11. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.005.910.000	566.100.000	11.31	4.439.810.000	

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

	Jumlah	305.658.283.887	139.225.628.765	44.26	166.432.655.122.31

2) Aspek Sumber Daya Manusia.

Sampai dengan 31 Desember 2015, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh 42 orang Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Honorer sebanyak 44 orang, dengan rincian sebagai berikut :

(1) BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	1
2.	SLTP	1
3.	SLTA	18
4.	DIPLOMA	4
5.	S1 (Strata I)	20
6.	S2 (Strata II)	
7.	S3 (Strata III)	-
	Jumlah	44

(2) BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN

Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
Pembina TK. I (IV/b)	1	Eselon II
Pembina (IV/a)	3	Eselon III
Penata Tk.I. (III/d)	-	-
Penata (III/c)	3	Eselon IV
Penata Muda Tk.I (III/b)	4	Eselon IV
Penata Muda TK.I (III/b)	5	Staf
Penata Muda (III.a)	13	Staf
Pengatur TK. I (II/d)	2	Staf
Pengatur (II/c)	2	Staf
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	7	Staf
Pengatur Muda (II/a)	2	Staf
JUMLAH	42	

3) Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh sarana dan prasarana (sampai tahun 2014), yaitu sebagai berikut :

Terlampir.....

BAB IV

P E N U T U P

Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari dapat dilaksanakan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang diwujudkan dalam tahun 2016. Keberhasilan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dibagi atas dua aspek yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dan kinerja keuangan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dan kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dan tingkat efisiensi keuangan.

Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategi tersebut telah dapat diukur, yaitu sebanyak 5 sasaran strategis, dengan 14 program dan 28 kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan pada bab II, maka secara rata-rata presentase capaian Indikator Kinerja sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi organisasi, memperlihatkan capaian rata-rata sasaran sebesar 59.25% atau dengan kategori belum berhasil.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dari 14 program dan 28 kegiatan tingkat capaian kinerja yaitu sebesar 96,10 %, yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 235,319,817,678,00 atau 87,12% dari anggaran sebesar Rp 241,354,355,970,00 capaian ini terlihat sangat jauh sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga berdampak pada penurunan capaian kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum.

Terhadap sasaran-sasaran yang belum tercapai sepenuhnya di samping adanya pengaruh faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya, juga disebabkan faktor internal yang perlu diperbaiki di masa mendatang seperti perencanaan yang kurang matang dan realisasi pelaksanaan yang tidak sepenuhnya tepat waktu, sehingga masih terdapat

kegiatan yang belum terlaksana ataupun terlambat dilaksanakan dan mengakibatkan pemanfaatan menjadi tidak optimal.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun mendatang maka perlu ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam perencanaan kegiatan yang diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
2. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan untuk menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
3. Lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
4. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat serta lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
5. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan ekonomis pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, kiranya LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para *stakeholders* dan memberikan informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas di masa mendatang.